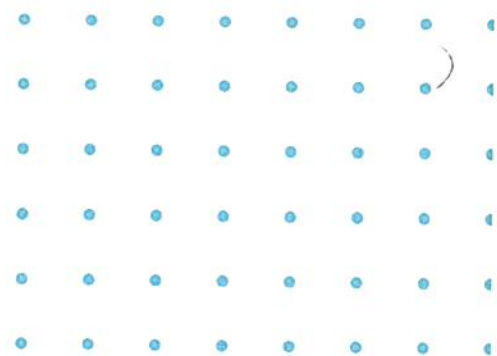




# SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI



**TRIWULAN III  
2025**

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI  
Jalan PANCASILA NOMOR 12 KOTA GUNUNG SITOLI-22814.  
[HTTPS://pn-gunungsitoli.go.id](https://pn-gunungsitoli.go.id)  
[info@pn-gunungsitoli.go.id](mailto:info@pn-gunungsitoli.go.id)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI**

Jln. Pancasila No. 12 Gunung Sitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 –Fax (0639/21343)  
Email : [info@Gunung\\_Sitoli.go.id](mailto:info@Gunung_Sitoli.go.id), Website : [www.pn-Gunung\\_Sitoli.go.id](http://www.pn-Gunung_Sitoli.go.id)

Nomor : /KPN.W2-U12/PW1.2.1/X/2025 Gunung Sitoli, 20 Oktober 2025  
Lampiran : 1 (Dokumen)  
Perihal : Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)  
Pegguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli  
Periode Juli s/d September 2025

Kepada Yth. Bapak Direktur Jendral Badan Peradilan Umum  
Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jln. Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan secara rutin per-tiga bulan sekali di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB, dengan ini kami mengirimkan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Periode Juli s/d September 2025 (data terlampir).

Demikian data ini kami kirimkan sebagai laporan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB

  
Zulfadly, S.H., M.H  
NIP. 19760906 200112 1 002

**Tembusan:**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Arsip (Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB)

**LAPORAN  
HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
TRIWULAN III**

**PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI  
KELAS IB**



**TAHUN 2025**

---


# LEMBAR PENGESAHAN

---

**LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS I B**

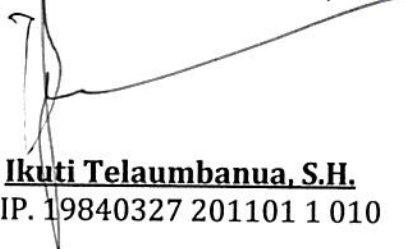
Disahkan di Gunung Sitoli  
20 Oktober 2025

Top Management,




**Zulfady, S.H., M.H**  
NIP. 19760906 200112 1 002

Sekretaris Tim Survei,



**Ikuti Telaumbanua, S.H.**  
NIP. 19840327 201101 1 010

Ketua Tim Survei,



**Gabriel Lase, S.H.**  
NIP. 19860717 201712 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB triwulan III tahun 2025 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survei persepsi korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui Aplikasi Sisuper. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja tim survei maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih dari korupsi.

Demikianlah laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB Triwulan III tahun 2025 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Gunung Sitoli, 20 Oktober 2025

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
BAB II METODOLOGI .....	4
2.1. Metode Penelitian .....	4
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	4
2.3. Teknik Survei .....	4
2.4. Teknik Analisis Data .....	4
2.5. Pelaksanaan Kerja .....	5
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	7
3.1. Profil Responden .....	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator .....	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB .....	18
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB.....	19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	21
4.1. Kesimpulan .....	21
4.2. Rekomendasi .....	21

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3 Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **1.4 Rencana Kerja**

### **1.4.1. Tahap Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Pelaksana dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya.

- b) Penyiapan sarana dan prasarana pengisian survei elektronik seperti komputer sehingga mempermudah masyarakat pengguna produk layanan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.
- c) Penyusunan Jadwal, penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### 1.4.2. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada Minggu pertama sampai Minggu ke empat bulan Oktober 2025. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Tabel 1  
Jadwal Pelaksanaan Kerja

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	01 Oktober s/d 02 Oktober 2025
2	Pengumpulan Data / Survei SKM	06 Oktober s/d 08 Oktober 2025
3	Pengolahan Data	09 Oktober s/d 13 Oktober 2025
4	Penyusunan dan Pelaporan	14 Oktober s/d 17 Oktober 2025

#### 1.4.3. Metode Survei

Metode survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang bernama SISUPER. Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi anti Korupsi dan Survei Harian.

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Metodologi Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskripsi kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB.

### 2.3. Teknik Survei

Teknik survei yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat link <http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id> dan link yang digunakan responden yaitu <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098696>.

### 2.4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB ini digunakan teknik analisis data kuantitatif.

## 2.5. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran/Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada 01 Oktober 2025. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

**Gambar 1**

**Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas**



**Tabel 2 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi**

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Data
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3 Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari Korupsi

## BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### 3.1. Profil Responden

#### 3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB mayoritas memiliki pendidikan S1 sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) responden.

**Tabel 4 Tingkat Pendidikan**

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	Tidak/Belum Sekolah	0
2	SD	0
3	SMP/ SLTP	1
4	SMA / SMU	13
5	D1	0
6	D2	0
7	D3	2
8	S1	21
9	S2	2
10	S3	1
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

#### 3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB memiliki pekerjaan dalam kategori lainnya sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) responden.

**Tabel 5 Jenis Pekerjaan Responden**

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	PNS	8
2	TNI	0
3	POLRI	0
4	SWASTA	11
5	WIRUSAHA	0
6	TENAGA KONTRAK	0
6	LAINNYA	21
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

### 3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun - 28 tahun. Bagi kelompok usia 29-39 tahun jumlah responden semakin sedikit, demikian pula kelompok usia 50 tahun - 59 tahun dan terakhir responden pada kelompok usia responden 60 tahun - 69 tahun.

**Tabel 6 Usia Responden**

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persen
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	15orang	37,50 %
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	14 orang	35,00 %
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	3orang	7,50 %
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	7 orang	17,50 %
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	1 orang	2,50 %
<b>Jumlah</b>		<b>40 orang</b>	<b>100%</b>

### 3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur

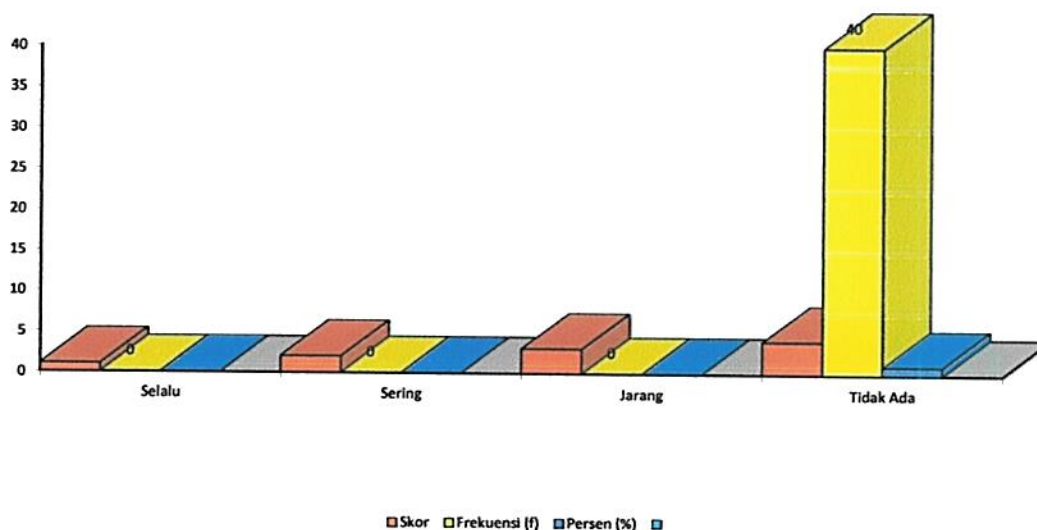
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil index 4,000. Melalui nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

**Tabel 7 Indikator Manipulasi Peraturan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0 %
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak Ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Manipulasi Peraturan



#### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa

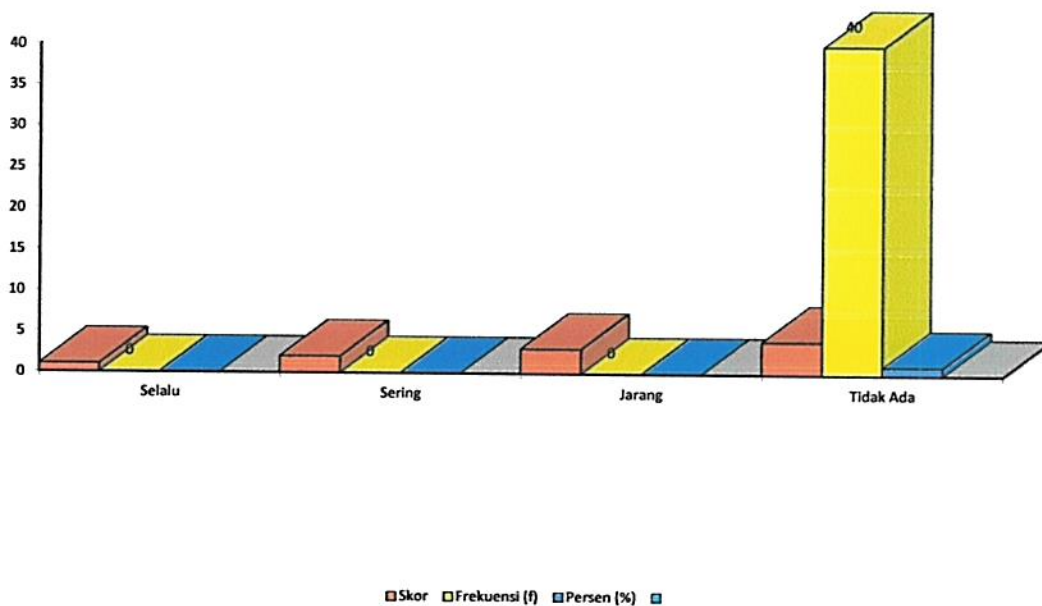
kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

**Tabel 8 Indikator Penyalahgunaan Jabatan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Penyalahgunaan Jabatan



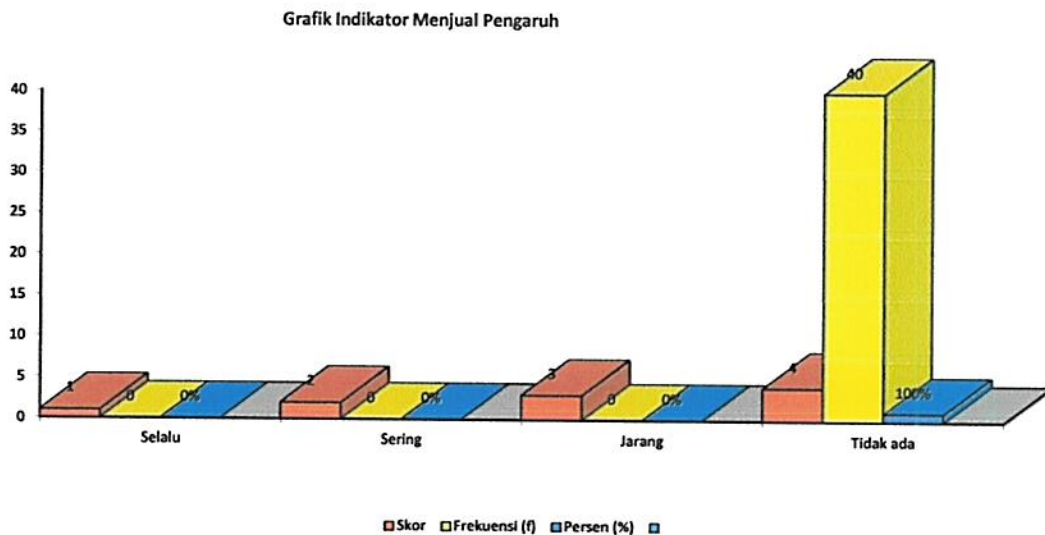
### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil index 4,000. Dengan hasil indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 9 Indikator Menjual Pengaruh**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



### 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

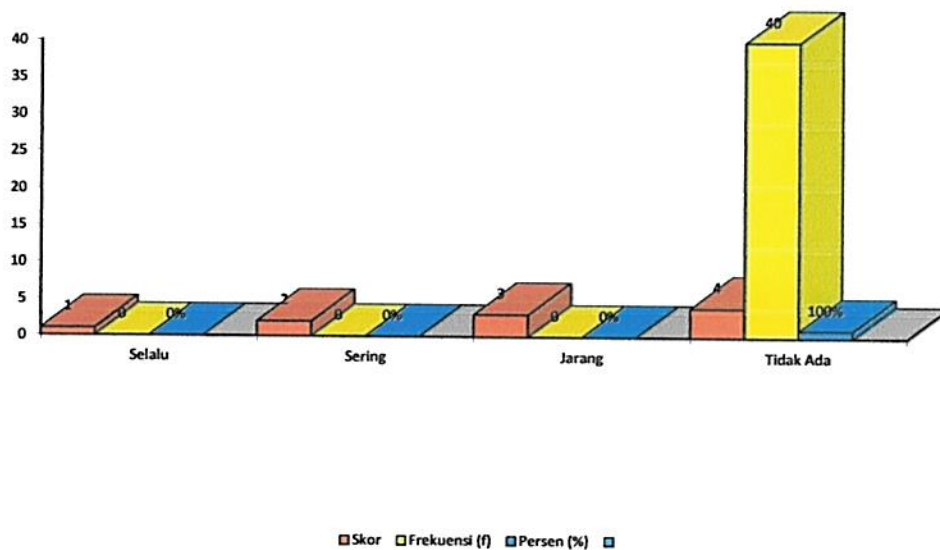
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 10 Indikator Transparansi Biaya**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Indikator Transparansi Biaya**



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

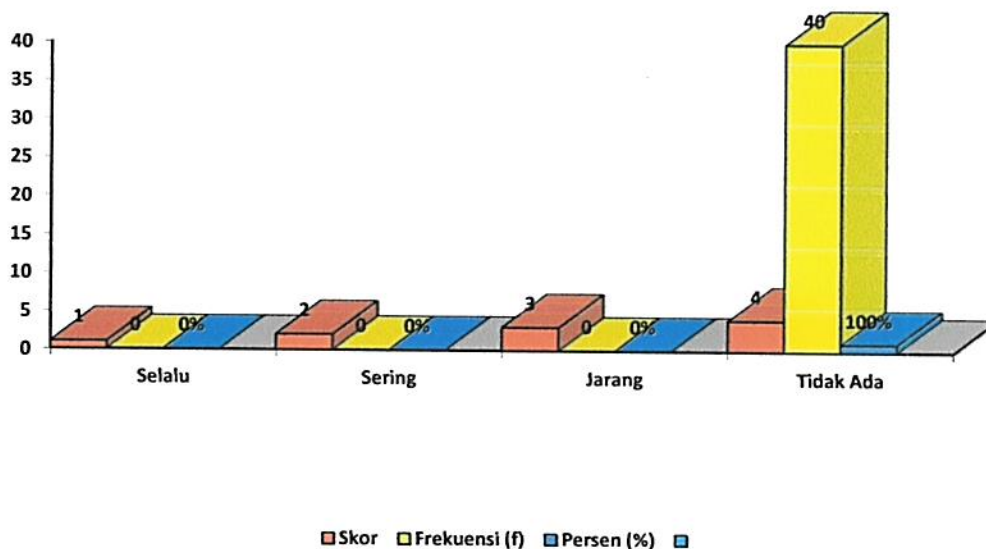
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 11 Indikator Biaya Tambahan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Indikator Biaya Tambahan**



### 3.2.6. Indikator Hadiah

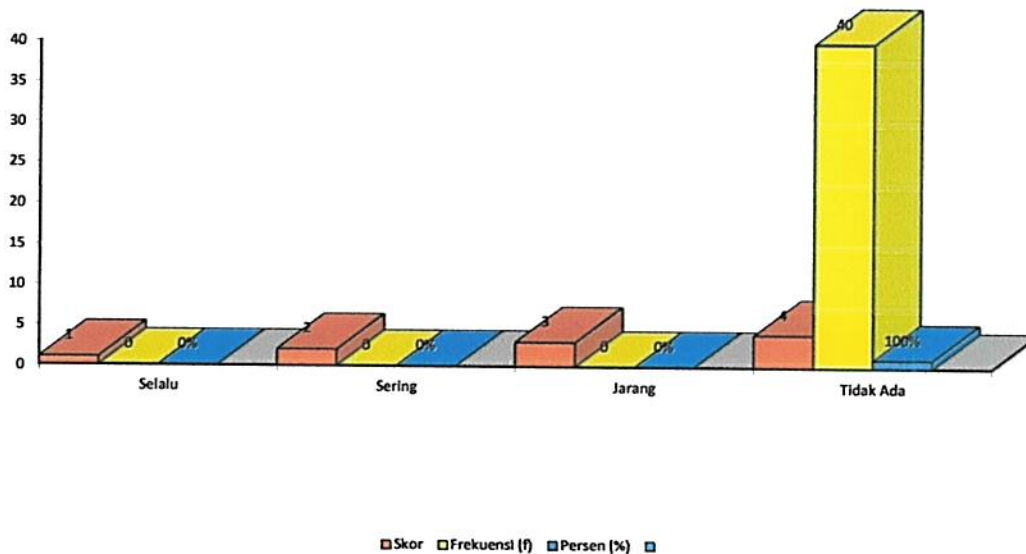
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dengan nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 12 Indikator Hadiah**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Hadiah



### 3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

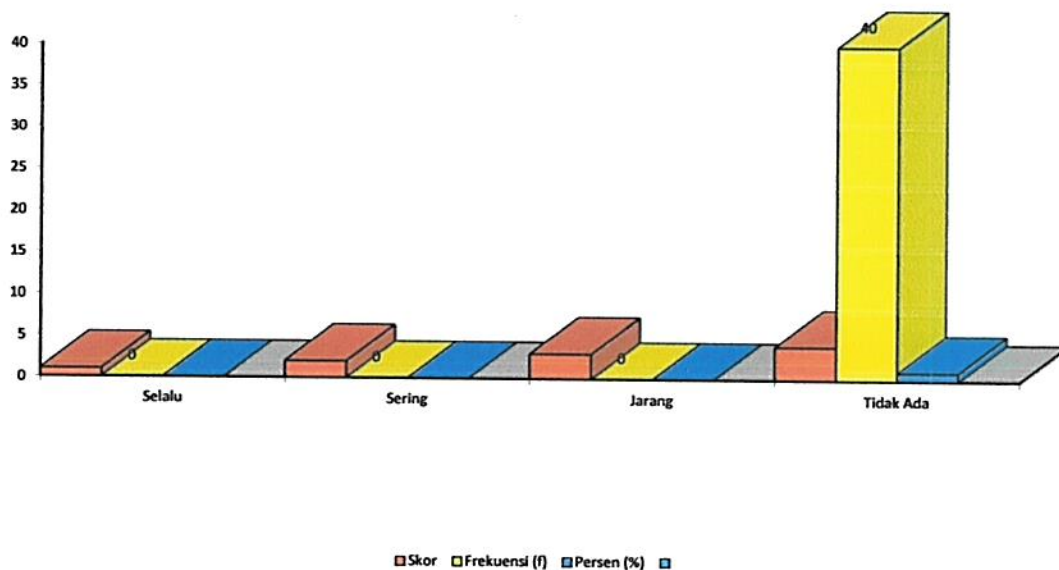
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 13 Indikator Transparansi Pembayaran**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Indikator Transparansi Pembayaran**



### 3.2.8. Indikator Pencaloan

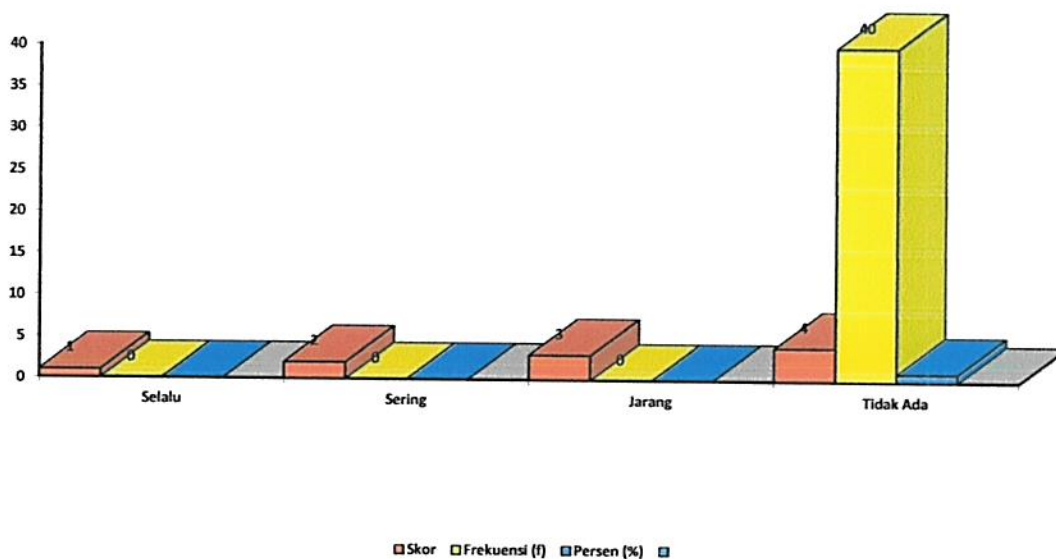
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

**Tabel 14 Indikator Pencaloan**

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik Indikator Pencaloan



### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

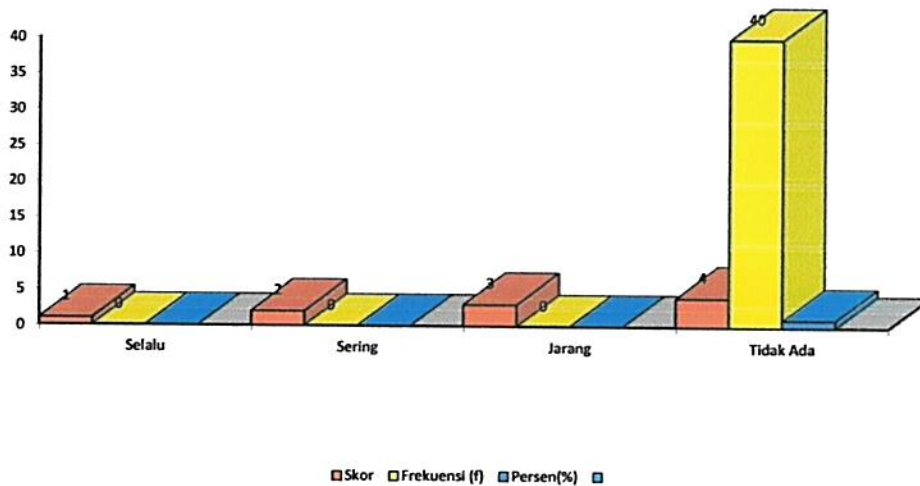
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Nilai Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari Korupsi.

**Tabel 15 Indikator Perbuatan Curang**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Indikator Perbuatan Curang**



### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

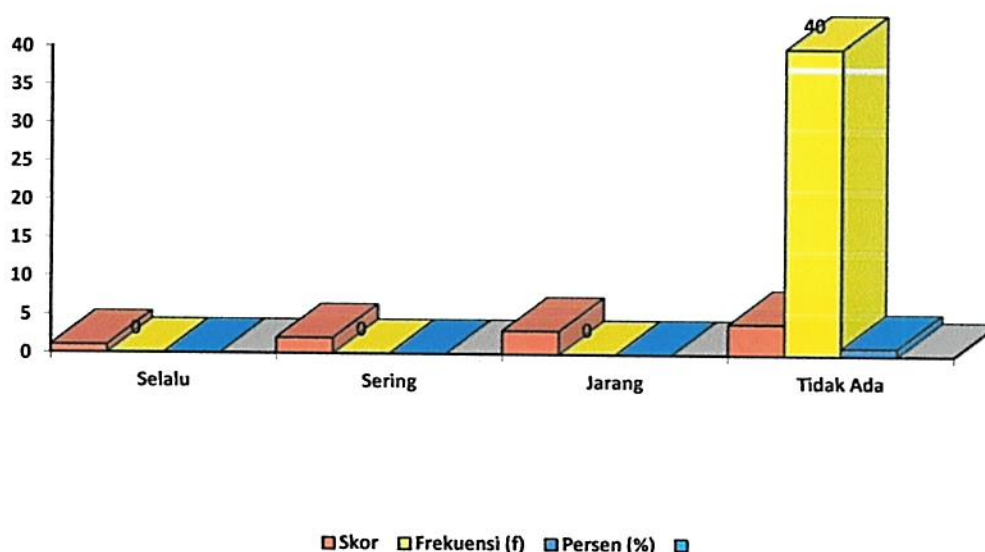
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil index 4,000. Dari nilai indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB bersih dari korupsi.

**Tabel 16 Indikator Transaksi Rahasia**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0%
2.	Sering	2	0	0%
3.	Jarang	3	0	0%
4.	Tidak ada	4	40	100%
Jumlah			40	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Indikator Transaksi Rahasia**



### 3.3 . Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB sebesar **4,00** dengan persentase **100 %** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di

bawah ini, maka skor Indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

**Tabel 17 Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL (SPAK)	MUTU	KINERJA
1	1.00-1.75	25 -43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 -62.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

### 3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga mejaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sudah memadai dan terarah untuk dipertahankan;
2. Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan bekerja berdasarkan aturan;
3. Transparansi Biaya sebaiknya lebih dipublikasi;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dipertahankan agar tidak ada hubungan langsung antara Pegawai dan Pencari Keadilan;
5. Memperbaharui daftar panjar biaya perkara sesuai dengan kondisi saat ini.

**Tabel Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja  
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli**

No.	Uraian	Nilai						Kinerja
		Ber suh	Cuku p Bersih	Kura ng Bersi h	Tida k Bersi h	Nilai Rata- Rata per Ruang Lingku p	NRR Tertim bang (NRR per RL X 1/10)	
		4	3	2	1			
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B dalam hal manipulasi peraturan?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B dalam hal Penyalahgunaan Jabatan?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B dalam hal Menjual Pengaruh?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B dalam hal Transparansi Biaya?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur pengadilan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I B dalam hal Biaya Tambahan?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I-B dalam hal Hadiah/Gratifikasi?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
7	Bagaimana pendapat Saudara mengenai Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I-B dalam hal Transparansi Pembayaran?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I-B dalam hal Pencaloan?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I-B dalam hal Perbuatan Curang?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
10	Bagaimana pendapat Saudara tentang Pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas I-B dalam hal Transaksi Rahasia?	40	0	0	0	4,000	0,400	Bersih
Rata-rata Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi							4,00	Bersih

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebesar **4,00** dengan presentase sebesar **100%**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,00 atau 100%** masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

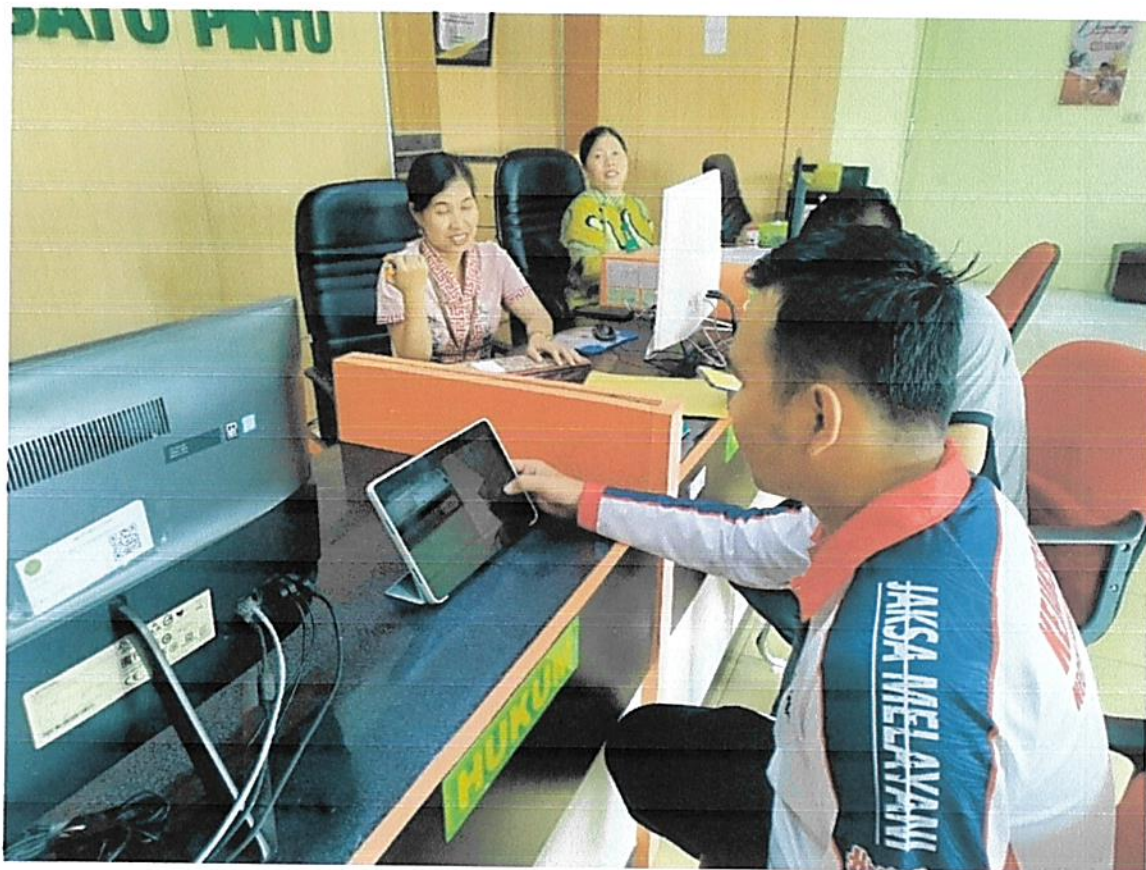
1. Indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur, mendapat Indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

#### 4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tahun 2025, menunjukkan **bahwa 3 unsur tertinggi terletak pada indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, dan 3 unsur terendah terletak pada indikator Manipulasi Peraturan/Prosedur, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh. Memiliki** nilai indeks paling rendah diantara indikator lainnya, karena itu perlu dievaluasi lagi.

# LAMPIRAN

**EVIDENCE PENGISIAN SURVEY PADA APLIKASI SI SUPER**



## TAMPILAN APLIKASI SISUPER

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

si SUPER  
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOL

Survey Penerimaan Ars. Korupsi  
**SPAK**  
Klik Di sini

Survey Kepuasan Masyarakat  
**SKM**  
Klik Di sini

Survey Harian  
**SH**  
Klik Di sini

Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 5.570 | Penggunaan Memori : 1.118B

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survey Penerimaan Ars. Korupsi | SPAK

Form kuisioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang teragaku pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

**Data Responden**  
Nama serta data responden

Layanan  
Layanan

Form Kuisioner  
isian form kuisioner SPAK

Kesan & pesan  
Melihat isi kecuran dan keluhan Anda

**Data Responden SPAK**

Nama	Dian Pristia Nurcahya Dita		
Umur / Jenis Kelamin	tahun	Pilih Jenis Kelamin	▼
Nomor HP	+62		
Distrik	Pilih Wilayah		▼
Pendidikan	Pilih Pendidikan		▼
Pekerjaan	Pilih Pekerjaan		▼

Kembali [Selanjutnya](#)

# HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III PADA APLIKASI SISUPER

